

KOMUNIKASI POLITIK DALAM FUNGSI *BUDGETING* DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Andi Kardian Riva'i¹, Hefri Yodiansyah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Persada
Bunda Jl. Diponegoro No.42, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota,
Kota Pekanbaru, Riau 28116
andiriva39i@gmail.com¹; hefri.yodiansyah@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik dan fungsi budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan anggaran, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melalui Badan Anggaran bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasarkan pada buku pedoman anggaran. Komunikasi politik dalam fungsi anggaran memiliki bentuk, strategi, media dan aktivitas yang khas, konstruksi politik yang mengarah kepada kepentingan yang dibangun atas dasar realitas pengetahuan, kesadaran umum, wacana publik yang dihasilkan dari konstruksi politik pengelolaan anggaran, hubungan antara belanja pemerintah dan penerimaan daerah sehingga fungsi budgeting bekerja berdasarkan kebijakan fiskal, fungsi alokasi dan azas pemerataan pembangunan.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Fungsi Anggaran, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

POLITICAL COMMUNICATION IN BUDGETING FUNCTIONS DPRD DISTRICT INDRAGIRI HULU

ABSTRACT

The purpose of this study is to gain an understanding and know the factors that influence political communication and budgeting functions of the Indragiri Hulu District Parliament. The results of this study indicate that in the determination of the budget, Indragiri Hulu Regency DPRD through the Budget Agency together with the Regional Government Budget Team (TPAD) agreed on the General Budget Policy - Priority Budget Ceiling (KUA-PPAS) based on the budget guidebook. Political communication in the budget function has a distinctive form, strategy, media and activity, political construction that leads to interests built on the reality of knowledge, public awareness, public discourse resulting from the political construction of budget management, the relationship between government spending and regional revenues so the budgeting function works based on fiscal policy, the allocation function and the principle of equitable development.

Keywords: *Political Communication, Budget Function, Indragiri Hulu Regency DPRD*

PENDAHULUAN

Komunikasi dalam konsep politik adalah pembentukan kesepakatan tentang sumberdaya kekuasaan. Sumberdaya kekuasaan berkaitan dengan sistem politik. Sebagaimana komunikasi lainnya, komunikasi politik juga didukung oleh beberapa unsur utama dalam komunikasi yaitu, komunikator politik, komunikan, isi komunikasi (pesan-pesan), saluran komunikasi, pengaruh komunikasi. Masing-masing dari unsur komunikasi politik ini memiliki fungsi untuk mencapai tujuan dari komunikasi politik itu sendiri. Sikap integritas (*personality integrity*) merupakan komitmen yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPRD yang terpilih mewakili rakyat melalui partai sebagai bentuk representatif dari citra positif dirinya dan juga partai politiknya melalui tindakan-tindakan yang pro rakyat sesuai dengan kode etik dan aturan-aturan yang ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik.

Tugas dan Fungsi DPRD dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi yang sangat penting di masyarakat. Sebagai lembaga Negara DPRD Indragiri Hulu bertindak sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi antara lain: a). Fungsi legislasi, dalam artian sebagai penyusun dan pembuat

Peraturan Daerah; b). Fungsi anggaran, sebagai lembaga yang berhak dalam menetapkan anggaran belanja daerah; c). Fungsi pengawasan, sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di daerah

Dari perspektif politik, peran DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam penganggaran daerah saat ini berhadapan dengan isu-isu krusial, diantaranya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Dalam situasi demikian, anggota DPRD selalu dituntut untuk mampu mencari upaya perbaikan pemerintahan daerah dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan mampu merepresentasikan aspirasi dan kepentingan warga ke dalam proses penganggaran daerah.

Anggaran daerah merupakan salah satu komponen dasar kebijakan publik daerah. Kebijakan anggaran daerah di Indragiri Hulu adalah merupakan keputusan politik yang ditetapkan Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dilaksanakan oleh birokrasi daerah

sebagai keputusan politik kebijakan anggaran sering melalui proses politik yang panjang dan kompleks. Kajian ini adalah memperkuat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu mengembangkan kapasitas anggotanya untuk menjadi lebih efektif, partisipatif dan transparan dalam menjalankan fungsi penyusunan peraturan, penganggaran, dan pengawasan pemerintah. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu harus mampu memperkuat kapasitas dalam membina hubungan yang baik dengan konstituen, sekaligus mampu menyusun kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah.

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hulu anggaran 2017 telah disahkan sebesar 1, 4 triliun lebih melalui Sidang Paripurna DPRD, yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten bersama dengan unsur-unsur pimpinan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam pembahasan yang dilakukan ditingkat Komisi DPRD dan sinkronisasi di tingkat Badan Anggaran untuk disetujui dan dilanjutkan kedalam Rapat Paripurna Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk disahkan Peraturan Daerah APBD. Asumsi APBD Tahun Anggaran 2017 pada KUA dan PPAS adalah sebesar Rp. 1.429.277.928.100.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa belum terjalannya komunikasi yang baik dalam memahami sistem anggaran kinerja, belum cukup menggali aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a). Komunikasi Politik dalam Fungsi Budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu; b). Faktor yang mempengaruhi Komunikasi Politik dalam Fungsi Budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

Menurut (Suharti, 2014: 69) Unsur dalam komunikasi politik mencakup semua unsur dalam komunikasi yaitu, komunikator (narasumber), pesan, saluran (media), sasaran dan pengaruh atau efek yang dihasilkan. Dalam komunikasi politik, unsur- unsur komunikasi tersebut memuat unsur politik. Komunikator dalam komunikasi politik adalah komunikator politik. Pesannya adalah pesan politik, salurannya adalah saluran politik, khalayak sasarannya adalah khalayak politik dan tujuan serta hasilnya adalah demi tujuan politik dan mempengaruhi sistem politik

Studi tentang komunikasi politik (McNair, 2011: 4-11) mengarah kepada tiga elemen dalam melihat hubungan antara

proses dengan tindakan politik, yaitu: Organisasi Politik, Media, Warganegara. McNair mengatakan komunikasi politik (McNair, 2011: 4) sebagai berikut: *I will define here simply as purposeful communication about politics. This incorporates: a). All forms of communication undertaken by politicians and other political actors for the purpose of achieving specific objectives; b). Communication addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper columnists; c). Communication about these actors and their activities, as contained in news.* Dari penjelasan McNair diatas juga dikutip oleh Supriadi kedalam bahasa Indonesia, sebagai *purposeful communication politics* yang mencakup: a). seluruh bentuk komunikasi yang dilakukan politisi dan aktor politik yang lain (selain politisi) dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu; b). komunikasi yang mengarah pada aktor-aktor di luar politisi seperti konstituen atau kolumnis surat kabar; serta c). komunikasi tentang aktor dan aktivitasnya seperti yang terdapat pada laporan berita, editorial, dan diskusi lain mengenai politik di media (Supriadi 2017: 26-27).

Komunikator politik tidak hanya partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislatif dan eksekutif.

Dengan demikian, sumber atau aktor politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik, misalnya presiden, menteri, DPR, MPR, KPU, Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD, Politisi, Fungsionaris Partai Politik, Fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan (Cangara 2009: 37).

Menurut Pasal 147 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 148 ayat 2 “Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah Kabupaten/Kota” (UU No. 23 Tahun 2014). DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya demi tercapainya kesejahteraan di daerah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 207 ayat 1 “hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar; ayat 2 hubungan kemitraan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk” persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD; persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah; rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014)

Lembaga negara DPR/DPRD yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi, antara lain: 1). Fungsi legislasi, dalam arti penyusun dan pembuat undang-undang; 2). Fungsi anggaran, sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran belanja; 3). Fungsi pengawasan, sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang-undang.

Menurut (Karwita, 2011: 13) Fungsi penganggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif dan sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah; Fungsi penganggaran ini perlu memperoleh perhatian penuh, mengingat makna

pentingnya sebagai berikut: a). APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, & fungsi stabilisasi); b). APBD sebagai fungsi investasi daerah; c). APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam Modul Analisis APBD untuk Anggota DPRD, *Local Governance Support Program LGDP* (USAID, 2009: iv), tiga kebutuhan dasar bagi efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam proses kebijakan anggaran daerah, yaitu: 1). Anggota DPRD memiliki sikap dan perilaku yang produktif mendorong APBD yang mensejahterakan masyarakat daerah; 2). Anggota DPRD memiliki pengetahuan dan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan pilihan-pilihan kebijakan anggaran yang menjawab permasalahan publik, seperti kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal; 3). Anggota DPRD memiliki keterampilan teknik analisis untuk memberikan masukan-masukan kritis terhadap kebijakan anggaran daerah dan memantau secara umum penyusunan anggaran daerah.

Penelitian yang dilakukan Rozidateno Putri Hanida (2016), dengan judul “Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program

dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman” Penelitian ini mengkaji tentang dinamika pengaturan uang dalam proses pengambilan keputusan program dan biaya anggaran lokal di wilayah Sleman. Aktor aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan anggaran dalam perspektif politik anggaran masih senantiasa memperjuangkan kepentingan sendiri. selanjutnya legislatif tidak bisa berbuat banyak terutama disebabkan pada dasarnya legislatif DPRD tidak punya cukup pengetahuan di bidang penganggaran. Ditemukan bahwa masih banyak anggota legislatif yang tidak mengerti apa yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sleman, selain itu landasan prioritas oleh legislatif masih tersekat-sekat pada pemahaman pemenuhan kebutuhan para konstituen di dalam penyusunan APBD terjadi proses sharing dan bargaining kepentingan antar aktor (Hanida, 2016).

Penelitian yang dilakukan Yadi Supriadi (2017) dengan judul “Komunikasi Politik DPRD dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Kota Bandung” Penelitian ini mengkaji tiga pokok persoalan dalam indentifikasi masalah, antara lain; 1). perencanaan komunikasi politik, 2). pesan komunikasi politik, dan 3). media komunikasi politik DPRD Kota Bandung

dalam meningkatkan peran legislatif di Kota Bandung. Perencanaan komunikasi politik DPRD Kota Bandung dilakukan berdasarkan pesan-pesan yang disaring dari berbagai sumber seperti kegiatan reses, informasi media massa, dan rutinitas rapat dewan. Sementara itu media yang digunakan dalam melakukan komunikasi politik sangat beragam, mulai dari komunikasi langsung dengan masyarakat yang dikunjungi, sampai pemanfaatan media sosial seperti website, twitter, Instagram, dan facebook (Supriadi, 2017).

Penelitian yang dilakukan Agus Riyanto (2012) dengan judul “Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010” Penelitian ini Mengemukakan bahwa Pendapatan dan belanja APBD adalah rencana keuangan tahunan yang berkaitan dengan DPRD, yang menguraikan rencana aktif dan program untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Atau APBD harus dioptimalkan untuk mencapai publik yang merupakan bagian dari pemerintah lokal. Penelitian ini menganalisis realisasi anggaran daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 hingga 2010 (Riyanto, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di DPRD

Kabupaten Indragiri Hulu, Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Peneliti, dalam melakukan penelitian kualitatif mempelajari secara intens situasi yang terjadi pada objek penelitiannya. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini tidak dibatasi dengan banyaknya atau jumlah responden (Satori, 2010: 50). Pemilihan sampel tidak bergantung pada kuantitas tetapi lebih pada kualitas orang yang akan diteliti yang disebut informan. Cara memilih sampel sebagai informan, yaitu: 1). Mencari informan untuk diwawancarai atau diobservasi; 2). Menentukan informan untuk dimintai keterangan sesuai dengan masalah yang diteliti. Informan penelitian berjumlah 6 orang yang ditentukan melalui *insidental sampling*. *Insidental sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Politik

Seluruh bentuk komunikasi yang dilakukan politisi dan aktor politik yang lain (selain politisi) dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu

Selain Anggota DPRD melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indragiri Hulu ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), Sekretaris Daerah (Setda) dalam pembentukan anggaran untuk menyepakati Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang didasari oleh buku pedoman anggaran. Secara eksplisit dapat dikatakan bahwa proses politik dalam penetapan anggaran melibatkan pemerintah daerah, dua sekretariat, badan dan dinas atau organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hulu

Bentuk komunikasi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan fungsi budgeting (anggaran) dalam bentuk mekanisme penetapan anggaran berbasis kinerja (ABK). Dalam penetapan anggaran berbasis kinerja (ABK) tersebut tidak lepas dari negosiasi dan retorika dalam menanggapi persepsi dan interpretasi yang beragam dari anggota dewan baik mekanisme formal maupun non-formal (diluar jam kerja). Selanjutnya, bentuk komunikasi yang lain seperti komunikasi interpersonal dalam upaya membangun keterbukaan, empati, dukungan, kesepakatan dalam membangun komitmen anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan suatu keputusan rencana

dan anggaran daerah.

Strategi komunikasi DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus berpegang pada mekanisme penetapan anggaran, besaran anggaran anggaran serta komunikasi yang baik antara anggota dewan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan rapat dengar pendapat. Strategi komunikasi anggaran itu sebagai instrumen atau alat yang digunakan pemerintah dalam merencanakan, memobilisasi sumberdaya, menggerakkan partisipasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Strategi lobi anggota dewan memainkan peranan penting dalam merumuskan dan penyusunan anggaran. Lobi merupakan bagian dari cara untuk memperjuangkan aspirasi konstituen daerah pemilihan khususnya masyarakat Indragiri Hulu yang perlu diperjuangkan.

Selanjutnya pelaksanaan *reses* sebagai langkah konkrit dalam memberikan penjelasan tentang pendidikan politik. Sosialisasi tugas dan fungsi dewan dalam bentuk *reses* dan penjangkauan aspirasi menggoalkan aspirasi adalah bentuk konkrit pendidikan politik, bahwa DPRD itu bekerja untuk masyarakat dan menggoalkan aspirasi mereka. Setiap warga negara berhak menerima informasi dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu

sebagai lembaga pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi pengelolaan anggaran. Itu adalah bentuk konkrit dari pendidikan politik

Dari jawaban anggota dewan Kabupaten Indragiri Hulu menandakan bahwa mereka memahami tugas dan fungsi mereka sebagai anggota dewan. dengan jawaban yang berbeda juga menandakan bahwa anggota dewan mengartikulasikan pendidikan politik dengan aktivitas yang berbeda ketika berhadapan dengan masyarakat. Pendidikan politik itu dimaknai sebagai upaya peningkatan pengetahuan politik masyarakat agar dapat berpartisipasi. Masyarakat dididik, diberdayakan dan dimobilisasi dalam upaya meng“goal”kan aspirasi masyarakat.

Komunikasi yang mengarah pada aktor-aktor di luar politisi seperti konstituen atau kolumnis surat kabar;

Media memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Hubungan mutualisme simbiosis, hubungan saling membutuhkan. Awak media butuh berita sementara anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu butuh publikasi ini menunjukkan bahwa hubungan saling membutuhkan. Media sebagai partner kerja bagi anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang dinilai dapat bersama-sama

menjalankan fungsi masing-masing bagi kontribusi untuk masyarakat. Hubungan yang baik media menjadi alat dan saluran komunikasi politik yang efektif bagi anggota dewan. Hubungan antara awak media dengan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam membantu menginformasikan kepada masyarakat dan juga sebagai penilai setiap proses dan hasil pembangunan. Semua anggota dewan sepakat bahwa terjadi hubungan saling membutuhkan, media memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Hubungan dengan media memiliki kecenderungan, kecendrungan media itu *memblow-up* pemberitaan politisi, orientasi komersial, tidak lagi berjalan dengan nilai-nilai jurnalisme yang berimbang tetapi mengarah pada keberpihakan, bisa juga pada politik pencitraan.

Selain media ada NGO, NGO tidak bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan anggaran, namun NGO bisa meminta informasi tetapi tak bisa mengintervensi. NGO bisa menyampaikan pendapat ke anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu untuk dibawa sebagai aspirasi. Media massa hanya memberikankan masukan, dan masukan ditampung untuk dibawa kedalam rapat sidang.

Independensi keputusan dan kebijakan anggaran tidak bisa diintervensi, mekanisme keputusan dan kebijakan anggaran sudah ditetapkan melalui peraturan dan perundang-undangan. dalam wawancara yang lain terlihat juga ada hubungan yang dibangun dengan NGO, media dengan pendekatan pendekatan negosiasi yang mengacu kepada usaha-usaha yang melibatkan kepentingan bersama dengan melakukan proses tawar menawar untuk mempertahankan posisi dan kepentingan masing-masing dalam membatu tugas dan fungsi dewan, dengan begitu terlihat juga manuver media massa, NGO, partai politik terhadap kepentingan organisasinya. Khusus partai politik, anggota partai politik yang terpilih menjabat sebagai anggota DPRD dalam priode jabatan tertentu harus membuat komitmen terhadap organisasi partai politik yang telah mengusung dan memenangkannya.

Media massa (pers) sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.

Karenanya, kebebasan pers menjadi

salah satu tolok ukur kualitas demokrasi. Karenanya, media berhak berpartisipasi, baik aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik politik secara bebas dan setara.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, media harus memiliki tanggung jawab besar, sebab media harus mampu mempertahankan eksistensinya tidak hanya dalam menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, tetapi juga menghormati hak asasi manusia, serta etika dan moral. media sebagai pilar demokrasi tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan harus mampu membawa perubahan bangsa menjadi lebih baik, bersikap independen dan objektif dalam pemberitaan.

Komunikasi tentang aktor dan aktivitasnya seperti yang terdapat pada laporan berita, editorial, dan diskusi lain mengenai politik di media;

Anggota Dewan yang di wawancarai menilai penggunaan media oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan fungsi-fungsi anggota

dewan, terutama fungsi budgeting menyatakan bahwa penggunaan media oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu hal itu penting agar apa yang dilakukan dapat diketahui publik dan pelayanan kepada publik semakin optimal. Dengan saluran saluran itu, masyarakat dapat mudah berkomunikasi langsung menyampaikan masukan, saran dan harapan terhadap program-program perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya anggaran.

Berkaitan dengan aktivitas politik anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan pemberitaan yang mendukung atau menguntungkan anggota dewan dijawab dengan jawaban yang bervariasi, Sumini Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan Jefriadi Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu menjawab relatif tergantung pada interpretasi dan persepsi tergantung pada menuver politik dewan dan keberpihakan, sementara Subhadil, Edi Supirman Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu melihat aktivitas politik mendapatkan pemberitaan dari media itu selalu menguntungkan dewan karena anggota dewan lebih dikenal masyarakat. Selanjutnya Wiwiek Hartati Anggota Komisi IV menitik-beratkan pada efisiensi dan efektivitas menggunakan

media dalam mengkomunikasikan fungsi dewan kepada publik sebagai bahan aspirasi sekaligus pencitraan diri anggota dewan sebagai wujud eksistensi diri dewan.

Menurut jawaban dari keenam informan dengan bahasa yang berbeda namun menurut peneliti mereka memiliki pemahaman yang serupa bahwa konstruksi simbol berkaitan dengan eksistensi dan aktivitas politik adalah “kepentingan”. Realitas media yang dibangun dalam konstruksi sosial didapat melalui proses internalisasi belajar terhadap diri, pengamatan dan ide, bahwa realitas dibangun atas dasar pengetahuan dalam keseharian yang tumbuh dan hidup dimasyarakat seperti kesadaran umum, wacana publik sebagai hasil dari konstruksi. Media memiliki efek yang nyata pada pemikiran dan perilaku seseorang. Media terkait eksistensi dan aktivitas politik anggota dewan itu memiliki kecenderungan memblow-up aktivitas pemberitaan politisi, orientasi komersial, adanya keberpihakan bagi yang punya modal dan menjadi apalagi kasus-kasus politisi.

Semua anggota dewan menjawab bahwa mereka membangun hubungan baik, dan terus membangun hubungan baik, karena kita saling membutuhkan. Media membutuhkan informasi peliputan berita

sebagai hak dan tanggungjawab sebagai insan pers. Anggota dewan juga membutuhkan mereka sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Selanjutnya juga sebagai modal utama politisi itu dikenal masyarakat, popularitas akan membantu mengurangi biaya peningkatan popularitas.

Fungsi Budgeting (penganggaran)

APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi). Kebijakan anggaran sebagai dasar pembentukan anggaran. Kapasitas anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam menetapkan dan memutuskan anggaran hanya mengakomodasi kebijakan ekonomi makro kedalam anggaran yang di susun kemudian menjamin terpenuhinya anggaran belanja. Artinya bahwa pemerintah daerah memperhatikan kondisi ekonomi makro dalam penyusunan RAPBD dan selanjutnya haruslah berpedoman pada aturan pengelolaan keuangan daerah. Pertimbangan tersebut secara detail disusun melalui beberapa aktivitas adalah, a). Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah (eksekutif) dalam mempersiapkan RAPBD selambat-

lambatnya 5 (lima) bulan sebelum APBD ditetapkan; b). Jika terjadi perubahan pada KUA-PPAS, Badan Anggaran memberi saran dan pendapat ke TPAD dalam mempersiapkan penetapan perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan di dalam rapat paripurna.

Fungsi alokasi dalam penyediaan barang publik dengan mengedepankan prinsip sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Salah satu fungsi alokasi adalah dana dari belanja daerah untuk anggaran infrastruktur. Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR dengan DPRD Komisi III Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengajukan anggaran Tentunya aspirasi pembangunan jembatan yang sudah diusulkan dan diperjuang bisa disahkan kedalam APBD.

Kontribusi DPRD dalam pemerataan pembangunan agar tepat sasaran adalah mengupayakan alokasi anggaran dengan mengarahkan anggaran untuk meningkatkan daya saing dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di kecamatan dan di desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Seperti contoh yang disampaikan oleh Bapak Subhadil Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam penyusunan anggaran 2019. "Kita sepakat

saja dengan pemerintah daerah, seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati Indragiri Hulu bulan November tahun lalu (2018) pada rapat paripurna dalam penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2019. Bahwa OPD untuk dapat mengatur pembelanjaan menurut skala prioritas yang ketat dan penghematan disegala bidang dan memangkas anggaran yang tidak penting. Belanja ditujukan buat memenuhi kebutuhan bukan keinginan dan pengeluaran ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya ini sinyal positif upaya efisiensi agar tepat sasaran

Semua anggota dewan yang diwawancarai sepakat bahwa, ketika terjadi defisit anggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menerapkan kebijakan anggaran defisit dengan tujuan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dengan cara rapat dengan pemerintah daerah (Bupati), dan selanjutnya kita jadwalkan untuk hearing dengan seluruh SKPD di Indragiri Hulu guna merasionalisasikan anggaran melalui penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan anggaran cadangan dan pinjaman ataupun dengan melakukan kerjasama seperti kerjasama dengan perusahaan di Indragiri Hulu sebagai cara

untuk mengatasi perlambatan dan negatifnya pertumbuhan ekonomi

Anggota dewan Kabupaten Indragiri Hulu sangat memahami tentang pengelolaan anggaran, hubungan antara belanja pemerintah dengan penerimaan pajak serta penyesuaian anggaran ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan. APBD itu adalah aturan yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD malam melihat pendapatan dan pengeluaran daerah. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

APBD sebagai fungsi investasi daerah;

Investasi yang baik merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi, secara umum menurut sebagian besar informan yang diwawancarai,

investasi di daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak mencolok namun kondisi ekonomi yang baik. Bila melihat data dari Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Indragiri Hulu, ada beberapa peluang investasi pada sektor industri, peternakan, perikanan, sektor pertambangan dan energi. Mengutip apa yang sudah disampaikan Sumini Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dalam wawancaranya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Indragiri Hulu berada pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2017, untuk Riau masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera dan dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional. Pertumbuhan ekonomi Riau saat ini berada pada angka 2,41 persen. Sementara untuk Nasional berada pada angka 5,03 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Riau hanya 2,71. Pertumbuhan ekonomi investasi menunjukkan adanya kenaikan pada produksi barang dan jasa disuatu daerah dan untuk Riau, sektor industri pengolahan merupakan pertumbuhan terbesar di Riau pada tahun 2017 lalu. Tahun 2016 lalu merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk di Indragiri Hulu. Ini disebabkan menurunnya harga komoditas utama Riau

seperti kelapa sawit, Migas dan terjadi bencana asap. Namun tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan dari sebelumnya terutama pada sektor pariwisata dan Non Migas. Untuk Indragiri Hulu, dikatakannya berada diatas rata-rata provinsi Riau yakni 3,68 persen. Selain itu juga untuk kemiskinan di Indragiri Hulu, juga berada dibawah rata-rata provinsi Riau 7,41 persen, Sumatera 10,04 persen dan Nasional 10,12 persen. Sementara Indagiri Hulu hanya 7,15 persen. Begitu juga dengan pengangguran Indragiri Hulu hanya 4,82 persen penduduk yang menganggur, sementara rata-rata Riau mencapai 6,4 persen. Artinya tersedia banyak lapangan kerja di kabupaten Indragiri Hulu”.

Potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya peningkatan pendapatan daerah seperti pajak daerah yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan; pajak cukai; pajak penghasilan; retribusi daerah yang terdiri dari retribusi perizinan; retribusi jasa umum; retribusi jasa usaha serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdiri dari 3 (tiga) potensi utama yaitu, industri perkebunan: industri hilir dan industri turunan dari CPO; kedua, pertambangan: minyak bumi dan bahan tambang lainnya; selanj utnya pariwisata.

Respon invsetor terhadap pembentukan daya tarik daerah berkaitan

dengan iklim investasi, kondisi ekonomi lokal, regional maupun global serta nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh unit ekonomi seperti industri perkebunan, pertambangan, potensi umum daerah; pangan, sayur-sayuran, peternakan, perikanan, pariwisata, budaya. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan roda ekonomi. Strategi pemasaran yang tepat, perkembangan investasi di daerah akan membaik dan investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Seluruh informasi yang diterima dari informan menjawab, sektor penerimaan terbesar dan paling menonjol di Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan APBD Kabupaten Indragiri Hulu didapat melalui pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdiri dari sektor industri: pembangunan industri hulu minyak dan gas; pembangunan industri hilir CPO.

Surplus anggaran merupakan selisih antara pendapat daerah dan belanja daerah pada tahun yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah belanja. Namun begitu tidak berarti bahwa daerah mengalami kelebihan kas, bisa jadi alokasi belanja tersebut dapat dimungkinkan tidak efisien atau karena pengelolaan anggaran yang tidak cermat.

Surplus anggaran dapat digunakan untuk pokok utang, dana cadangan, dan investasi daerah sesuai kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan);

Semua Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Masa Bakti 2014-2019 yang terpilih menjadi informan sepakat bahwa anggaran merupakan instrumen penting dalam fungsi manajemen yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu. Dari keenam informan yang menarik perhatian peneliti adalah tanggapan dari Sumini Wakil Ketua I, Subhadil Anggota Komisi II dan Edi Supirman Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Sumini memiliki sudut pandang yang lebih luas mengenai APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah bukan hanya dalam hal budgeting tetapi lebih dari itu, interpretasi Sumini mengenai paradigma melayani, pemerintah yang selama ini harus dilayani oleh masyarakat padahal seharusnya pemerintah menjadi pelayan masyarakat. Ini kunci persoalannya, bila paradigma ini belum berubah maka sulit diharapkan bentuk manajemen dan

instrument apa pun sulit mengubah wajah pemerintahan secara mendasar.

Subhadil berbicara lebih kepada hal yang substantif, secara rinci dijelaskan dalam bentuk fungsi anggaran, dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bertindak aktif, proaktif dan selektif karena DPRD adalah lembaga yang mengesahkan RAPBD. Selanjutnya adalah fungsi otorisasi adalah mandat yang diberikan negara untuk menetapkan anggaran sebagai wujud dari kekuasaan anggaran. Dan poin selanjutnya subhadil juga menjelaskan fungsi pengawasan sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan sesuai dengan kebijakan anggaran mulai dari pengawasan terhadap perencanaan, pengawasan terhadap penyusunan KUA-PPAS, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, hingga pengawasan terhadap evaluasi berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dari kepala daerah selaku pengguna anggaran.

Selanjutnya tidak kalah pentingnya apa yang disampaikan oleh Edi Sapirman berkaitan fungsi anggaran oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan memperhatikan siklus anggaran anggaran APBD yang mulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan yang terdiri a). penyusunan

dan penetapan 1 tahun sebelum tahun anggaran; b). pelaksanaan 1 tahun saat tahun anggaran berjalan; c). laporan peranggungjawaban APBD, secara detail dapat dilihat sebagai berikut:

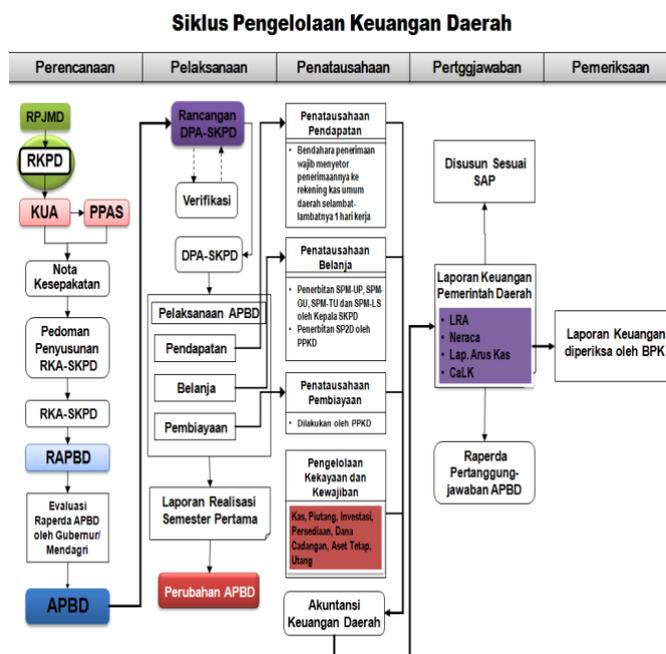
Tabel 1. Jadwal Penyusunan dan Penetapan RAPBD Kabupaten Indragiri Hulu

No	Uraian	Waktu
1.	Penyusunan RKPD	Akhir Bulan Mei
2.	Penyusunan KUA-PPAS Kepada Kepala Daerah	Minggu 1 Bulan Juni
3.	Penyampaian KUA-PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD	Pertengahan Bulan Juni
4.	KUA dan PPAS disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD dan RKA-PPKD	Akhir Bulan Juli
5.	Dokumen yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan ke Kepala Daerah perihal pedoman RKA-SKPD	Awal Bulan Agustus (1 Minggu)
6.	Penyusunan RKA- SKPD	Minggu 1 Bulan Agustus s/d Minggu 1 bulan Oktober (2 ½ Bulan)
7.	Penyampaian RAPBD ke DPRD	Minggu pertama Bulan Oktober
8.	Pengambilan keputusan bersama (DPRD dan Kepala Daerah	Paling lama 1 Bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan (Bulan November)
9.	Hasil evaluasi RAPBD	15 hari kerja (Bulan Desember)
10.	Penetapan Perda tentan APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Akhir Desember (31 Desember)

Sumber: Data olahan, 2019.

Selanjutnya, di gambarkan juga kedalam siklus pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut:



Sumber: DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, 2019

Gambar 1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penerapannya di DPRD ada bagian atau unit yang menangani dan terlibat didalam penyusunan anggaran, yaitu Badan Anggaran (Banggar). Aktivitas Banggar antara lain, pertama, saran dan masukan kepada Kepala Daerah (Bupati Indragiri Hulu) tentang penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang diajukan pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam sidang paripurna. Selanjutnya, Komisi-komisi DPRD, Komisi di lingkungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu adalah kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintahan,

perekonomian dan pembangunan, keuangan dan investasi daerah serta kesejahteraan rakyat.

Fungsi otorisasi sebagai dasar ataupun pedoman pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran. Otorisasi memiliki makna “pemberian kekuasaan” jika dikaitkan dengan budgeting (anggaran). Anggota dewan Indragiri Hulu diberikan kekuasaan untuk melaksanakan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD. Anggota dewan dalam hal ini adalah yang mengesahkan anggaran yang telah dianggarkan oleh kepala daerah dan jajaran (SKPD)

Sumini Wakil Ketua I, Raja Irwantoni Ketua Komis III, Jefriadi Sekteraris Komisi II, dan Edi Supirman Anggota Komisi II memberikan pertanyaan setuju, fungsi pengawasan anggota DPRD dimaksudkan untuk mengawasi pendistribusian APBD. informasi realisasi anggaran dapat dikontrol melalui laporan triwulan yang diberikan berupa, yaitu 1). Laporan perbandingan APBD dengan realisasinya; 2). Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap OPD terkait memuat progress capaian kinerja serta beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. kedua laporan tersebut merupakan alat bagi kami untuk melihat realisasi anggaran apakah

pemerintah telah melaksanakan sesuai ketentuan atau tidak.

Wiwiek Hartati Anggota Komisi IV memberikan tanggapan setuju namun memberikan catatan, realisasi anggaran bukan hanya dilihat dari daya serap anggaran saja, tetapi dilihat dari hasil penggunaan anggaran tersebut. Mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Kita harus merubah mindset kita bukan berpikir soal daya serap tetapi terealisasikan sesuai dengan perencanaan yang baik.

Sementara Subhadil Anggota Komisi II memberikan tanggapan kurang setuju, pelaksanaan anggaran hanya didasarkan pada realisasi anggaran dibandingkan dengan serapan anggaran. Pengawasan seperti ini sebenarnya telah melegitimasi kehendak elit kekuasaan yang ada dalam struktur pemerintahan baik yang ada di eksekutif maupun yang ada didalam legislatif itu sendiri. Pengawasan itu dimulai dari perencanaan, hingga proses pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban. pengawasan pada tahap pemanfaatan anggaran yang sebagian besar pada pengawasan teknis, artinya skill dan pengetahuan dewan dalam teknis sangat diperlukan, sering kali pengetahuan dewan terhadap 1 (satu) bidang kegiatan masih jauh dibawah pengetahuan SKPD

yang menangani kegiatan APBD bidang tersebut, sehingga pengawasan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu tidak dapat menemukan bukti yang akurat untuk dapat menindaklanjuti hasil temuannya dilapangan.

Fungsi pengawasan dalam anggaran merupakan bentuk jaminan atas pengelolaan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana. Pengawasan dimulai dari perencanaan hingga pada proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Wujud dari fungsi pengawasan anggaran adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh OPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, maka anggota dewan dapat melakukan yaitu: 1). Memberitahukan kepada kepala daerah (pejabat yang berwenang) untuk ditindaklanjuti oleh satuan pengawas internal; 2). Membentuk Pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat; 3). Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik.

Selanjutnya dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi politik dalam fungsi budgeting DPRD Kabupaten Indragiri Hulu antaranya lain sebagai berikut:

- a. Faktor budaya, budaya mengacu pada kebiasaan, bahasa, kesenian, nilai-nilai yang dipelajari, kepercayaan, dan perilaku yang umum bagi sekelompok individu. Komunikasi dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dan bersifat timbal balik. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu memiliki budaya sendiri dalam mengimplementasikan komunikasinya sehingga peran budaya ini perlu dipahami oleh partisipan komunikasi guna menciptakan hubungan yang penuh makna antar partisipan komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda.
- b. Faktor kekuasaan, kekuasaan merupakan salah satu dimensi dari keseluruhan hubungan anggota dewan. Dalam hal ini kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan apa yang terjadi pada orang lain. Hubungan antara pemimpin dan anggota dalam organisasi DPRD Indragiri Hulu harus dibina dengan sebaik mungkin. Kekuasaan yang otoriter akan menjadi hambatan bagi komunikasi politik dalam fungsi anggaran.
- c. Faktor persepsi, persepsi adalah proses memberi makna pada pesan yang diterima atau ditanggapi sehingga

- anggota organisasi memperoleh makna yang baru. Masing-masing anggota organisasi akan membentuk sebuah persepsi terhadap anggota organisasi lainnya. Persepsi ini sangat penting untuk mencapai kesamaan makna. Adapun pengaruh persepsi dalam komunikasi politik dalam fungsi anggaran dapat bersifat positif dan negatif. Pengaruh persepsi yang positif misalnya memahami dan menghargai adanya perbedaan persepsi. Sementara itu, pengaruh persepsi yang negatif misalnya terjadi kesalahan persepsi yang dapat menimbulkan konflik.
- d. Faktor konsep diri. konsep diri merupakan semacam pelabelan yang secara konstan digunakan untuk menggambarkan diri sendiri kepada orang lain. Sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh partisipan komunikasi akan tampak saat berkomunikasi dan hal-hal tersebut merupakan cerminan diri.
- e. Faktor atraksi, melalui atraksi interpersonal dapat kemunculan pesan dapat diprediksi, siapa yang menjadi penerima pesan, dan bagaimana pesan akan diterima. Atraksi interpersonal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri yang rendah, isolasi sosial, daya tarik fisik, ganjaran, *familiarity*, kedekatan, dan kemampuan.
- f. Faktor emosi, emosi merupakan reaksi biologis, kognitif, perilaku dan afeksi subyektif terhadap sebuah peristiwa atau kejadian. Emosi merupakan reaksi terhadap apa yang dialami. Pada umumnya, emosi berasal dari stimuli eksternal atau akibat terjadinya perubahan fisiologi yang mempengaruhi perilaku dan komunikasi seseorang. Emosi berperan dalam membantu manusia mengelola kehidupan sosial yang kompleks termasuk di dalamnya hubungan interpersonal. Ekspresi emosional pada umumnya dipengaruhi oleh norma-norma sosial budaya dan aturan-aturan.
- g. Faktor harga diri, harga diri berkaitan erat dengan atraksi interpersonal dan konsep diri. Hubungannya dengan komunikasi interpersonal dan komitmen organisasi adalah dampak yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat yang pada umumnya berhubungan dengan pencitraan harga diri.
- h. Faktor keterbukaan, keterbukaan juga berkaitan erat dengan konsep diri. Konsep diri seseorang akan berkembang dan meningkat jika ia

menerima reaksi orang lain terhadap keterbukaan dirinya. Keterbukaan dalam berorganisasi sangat diperlukan untuk menyampaikan beragam informasi tentang dirinya dan pendapatnya tentang orang lain. Hal ini akan menciptakan kualitas hubungan yang baik. Hubungan tidak akan mencapai kedekatan atau keintiman tanpa adanya *self-disclosure*.

- i. Faktor kesadaran diri, kesadaran diri adalah pemahaman terhadap diri sendiri. Setiap anggota organisasi memiliki kepribadian yang kompleks. Dalam kaitannya dengan komunikasi interpersonal adalah bagaimana menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang akan mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan konsep diri yang dimiliki.
- j. Faktor gender, Secara psikologis, laki-laki dan perempuan berbeda dalam berkomunikasi dan cara mempengaruhi orang lain. Perbedaan gaya berkomunikasi berdasarkan gender ini menjadi pertimbangan dalam menjalin komunikasi politik yang efektif guna menghasilkan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal, khususnya fungsi budgeting.
- k. Faktor kepribadian, kepribadian adalah serangkaian predisposisi internal yang

bertahan lama dan karakteristik perilaku yang menggambarkan bagaimana seseorang bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Melalui komunikasi interpersonal anggota organisasi dapat meningkatkan kesadaran terkait konsep dirinya dan bagaimana ia berhubungan dengan orang lain.

- l. Faktor kedekatan, faktor kedekatan ini adalah bagaimana anggota organisasi membangun, menjalin dan membina hubungan keakraban antarsesama anggota organisasi melalui komunikasi interpersonal. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan simpati sehingga dapat mempengaruhi lobi-lobi politik yang dilakukan.
- m. Faktor media massa, dalam upaya peningkatan kualitas komunikasi politik dalam fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hulu khususnya fungsi budgeting, media massa digunakan sebagai sarana yang mudah, murah, dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Indragiri Hulu

SIMPULAN

1. Ada dua substansi yang penting dalam penelitian ini, pertama komunikasi politik DPRD Kabupaten Indragiri

Hulu dalam fungsi budgeting didalam pelaksanaannya memiliki bentuk, strategi, media, aktivitas yang khas, konstruksi politik anggota dewan mengarah pada kepentingan yang dibangun atas realitas pengetahuan, kesadaran umum, wacana publik dalam pengelolaan anggaran. Kedua, anggaran adalah instrumen dalam melihat kebijakan, fungsi alokasi dan azas pemerataan pembangunan yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik dalam fungsi budgeting anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu meliputi faktor budaya, kekuasaan, persepsi, konsep diri, atraksi, emosi, harga diri, keterbukaan, kesadaran diri, gender, kepribadian, kedekatan dan faktor media massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanida, Rozidateno Putri. "Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman."
- Karwita, H.A. 2011. "Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan ' Good Governance .'": 1–23.
- McNair.B. 2011. *An Introduction to Political Communication*. Fifth Edit. LONDON AND NEWYORK: Routledge.
- Riyanto, Agus. 2012. "POLITIK ANGGARAN PROVINSI JAWA TENGAH : ANALISIS REALISASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008-2010 Agus Riyanto." 12(2). <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/470/592>.
- Satori, Djam'an, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung , 2010.
- Suharti, Bangun. 2014. "SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT (Studi Pada DPRD Kota Bandar Lampung Dari Partai Demokrat Masa Bakti 2009-2014)." 16(2): 67–76.
- Supriadi, Yadi. 2017. "Komunikasi Politik DPRD Dalam Meningkatkan Peran Legislatif Di Kota Bandung." *Media Tor* 10(1): 25–36.
- USAID. 2009. *Analisis APBD Untuk Anggota DPRD*.
- UU23/2014. 2014. "Pemerintahan Daerah."